

PUTUSAN
Nomor 445/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan JAF Nomor X0-XX, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa BBB, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1819/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: PPP, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 23 April 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

SSS, beralamat di CCC N.A., SSS, KKK, Jalan JJJ, Kavling XX-XX, Jakarta XXXX0;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. H. MMM, M.M., kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum Pajak, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 192626, tanggal 25 Juli 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108701.14/2010/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 21 Januari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat menerima banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-01207/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 26 Agustus 2016 sehingga perhitungan besarnya PPh OP Tahun Pajak 2010 seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Penjelasan	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Penghasilan neto dalam negeri	3.955.200.095
2	Penghasilan neto luar negeri	42.314.877
3	Jumlah penghasilan neto	3.997.514.972
4	PTKP	18.480.000
5	Penghasilan Kena Pajak	3.979.034.000
6	PPh Terutang	1.138.710 .200
7	Kredit Pajak PPh 21	1.101.072.800
8	Kredit pajak PPh 24	10.206.249
9	PPh 29 dibayar sendiri	2.488.251
10	PPh Kurang Bayar	24.942.900

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 445/B/PK/Pjk/2020

11	Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP (24 bulan x 2% x Angka 10)	11.972.592
----	--	------------

Bahwa demikianlah banding ini Pemohon Banding sampaikan. Mohon kiranya Majelis Yang Terhormat dapat menerima dan mengabulkan permohonan banding ini dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108701.14/2010/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 21 Januari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01207/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan, Nomor 00001/205/10/053/15 tanggal 26 Juni 2015 Tahun Pajak 2010, atas nama: SSS, NPWP 0X.XXX.XXX.X.0XX.000, beralamat di d/a CCC NA, Jalan JJJ Kav. XX-XX, SSS, KKK, JSS, dan menetapkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 yang terutang menjadi sebagai berikut:

Penghasilan neto dalam negeri	Rp.	3.955.200.095
Penghasilan neto luar negeri	Rp.	42.314.877
Jumlah penghasilan neto	Rp.	3.997.514.972
PTKP	Rp.	18.480.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp.	3.979.034.000
PPh Terutang	Rp.	1.138.710.200
Kredit Pajak PPh 21	Rp.	1.101.072.800
Kredit pajak PPh 24	Rp.	10.206.249
PPh 29 dibayar sendiri	Rp.	2.488.251
PPh Kurang Bayar	Rp.	24.942.900
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP (24 bulan x 2% x Angka 10)	Rp.	11.972.592
PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp.	36.915.492,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 April 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108701.14/2010/PP/M.XVA Tahun 2018 tanggal 21 Januari 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108701.14/2010/PP/M.XVA Tahun 2018 tanggal 21 Januari 2019 untuk seluruhnya terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-01207/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan, Nomor 00001/205/10/053/15 tanggal 26 Juni 2015 Tahun Pajak 2010, atas nama: SSS, NPWP X.XXX.XXX.X-0XX.000, beralamat di d/a CCC NA, Jalan JJJ Kav. XX-XX, SSS, KKK, JSS, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan, Nomor 00001/205/10/053/15 tanggal 26 Juni 2015 Tahun Pajak 2010, atas nama: SSS, NPWP 0X.XXX.XXX.X-0XX.000, beralamat di d/a CCC NA, Jalan JJJ Kav. XX-XX, SSS, KKK, JSS, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juli 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01207/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 26 Agustus 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00001/205/10/053/15 tanggal 26 Juni 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: X.XXX.XXX.X-0XX.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp36.915.492,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penghasilan Neto di Luar Negeri (*Capital Loss*) sebesar Rp312.037.080,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Penghasilan Neto di Luar Negeri (*Capital Loss*) sebesar Rp312.037.080,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yang dilakukannya telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena penggabungan penghasilan dan kerugian Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali di luar negeri yaitu Amerika Serikat (negara sumber yang sama) memperoleh jumlah penghasilan neto (laba neto) Tahun 2010 sebesar Rp42.314.877,00; dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya yang diperoleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali di dalam negeri untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 445/B/PK/Pjk/2020

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp36.915.492,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan neto	Rp.	3.997.514.972,00)
PTKP	Rp.	18.480.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp.	3.979.034.000,00)
PPh Terutang	Rp.	1.138.710.200,00)
Kredit Pajak	Rp.	1.113.767.300,00)
PPh yang kurang/(lebih) dibayar	Rp.	24.942.900,00)
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP (24 bulan x 2% x Angka 10)	Rp.	11.972.592,00)
PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp.	36.915.492,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020 oleh Prof. Dr. H. M. HHH, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan III, S.H.,M.H. dan Dr. FFF, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan UUU, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd.

III, S.H.,M.H.

ttd.

Dr. FFF, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. M. HHH, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. UUU, S.H

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. AAA, S.H.
NIP XXXX0XXX XXXX03 X 00X